

ABSTRAK

Penelitian ini akan memberikan hasil yang objektif dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemerintahan terkait masalah kebijakan. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan jejaring berdasarkan dialektika antar aktor karena penting untuk menjelaskan posisi aktor secara singkat dan mendasar.

Penulis ingin melihat kinerja suatu kebijakan tidak serta merta hanya berdasarkan posisi aktor, sumber daya, disposisi, dan komunikasi. Namun perlu mempertimbangkan dialektikal aktor dari bawah ke atas karena terdapat struktur dan entitas yang terbentuk melampaui batas masalah yang formal. Perlu input tambahan sebagai *feedback* dari kebijakan mulai dari fungsionalitas organisasi dan kelembagaan, interaksi aktor, dan pengaruh politik yang mempertahankan kinerja kebijakan tersebut agar stagnan atau jalan ditempat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dialektikal pada struktur dan agen yang perlu dioptimalkan karena terdapat hambatan dari sisi struktur pelabuhan selat lampa yakni struktur SKPT itu sendiri yang masih berbentuk Unit pelaksana teknis, kemudian struktur dan agen yang terpisah dari SKPT pengelolaannya yakni Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum.Perindo) sehingga tidak terintegrasi pemasaran hasil perikanan, selanjutnya pemerintah Kabupaten Natuna dan Provinsi Kepulauan Riau juga tidak membentuk kelompok kerja sesuai amanat dari kebijakan yang telah ditetapkan. Melihat pada konteks jejaring kebijakan, terdapat sebuah *patron client* antara nelayan dan pengusaha besar (tauke), lemahnya pengawasan pemerintah dan kurangnya koordinasi antar lembaga.

Pada akhirnya *outcome* jejaring kebijakan ini mengakibatkan kekalahan nelayan lokal dalam bersaing mulai dari alat tangkap dan kapal yang digunakan, selanjutnya lemahnya pasar yang membuat manajemen rantai pasok perikanan cukup rentan akibat infrastruktur yang kurang dan kuatnya para tauke dalam memonopoli pasar, kemudian kelembagaan SKPT yang tidak terintegrasi dan masih terdapat kelemahan koordinasi serta belum adanya lembaga yang memiliki kewenangan sesuai kebijakan SKPT membuat fungsionalisasi SKPT tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kata kunci : Jejaring Kebijakan, Maritim, Perikanan, Kinerja Kebijakan, SKPT

ABSTRACT

This research will provide objective results in the development of science, especially in the field of government related to policy issues. In this study the authors will use a network approach based on dialectics between actors because it is important to explain the actor's position briefly and fundamentally.

The author wants to see that the performance of a policy is not necessarily only based on the actor's position, resources, disposition, and communication. However, it is necessary to consider dialectical actors from the bottom up because there are structures and entities that are formed beyond the boundaries of formal issues. Additional input is needed as feedback from policies starting from organizational and institutional functionality, interaction actors, and political influence that maintains the performance of these policies so that they stagnate or run in place. The method used in this research is a qualitative method.

The results of this study indicate that there is a dialectic in the structure and agents that need to be optimized because there are obstacles in terms of the structure of the Selat Lampa port, namely the SKPT structure itself which is still in the form of a technical implementing unit, then the structure and agents which are separate from the SKPT management, namely the Indonesian Public Fisheries Company (Perum .Perindo) so that the marketing of fishery products is not integrated, then the Natuna Regency and Riau Islands Province governments also do not form a working group according to the mandate of the established policy. Looking at the policy context, there are protective clients between fishermen and big businessmen (tauke), weak government oversight and lack of coordination between agencies.

In the end, the results of this networking policy resulted in the defeat of local fishermen in competing starting from the fishing gear and vessels used, then the weak market which made the fishing supply chain quite vulnerable due to the lack of infrastructure and strong tauke in monopolizing the market, then the SKPT institution which was not integrated and there are still weaknesses in coordination and the absence of an institution that has the authority according to the SKPT policy makes the SKPT functionalization not work as expected.

Keywords: *Policy Network, Maritime, Fisheries, Policy Performance, SKPT*